

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ROAD MAP PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2020-2024





**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1764 KPTS/M/2020
TENTANG
ROAD MAP PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender di dalam segala aspek khususnya dalam pembangunan nasional, perlu melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengarusutamaan gender secara lebih sistematis dan terintegrasi dalam rencana pembangunan dan budaya kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu disusun *roadmap* pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang *roadmap* Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
 6. Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012; Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1515/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ROAD MAP PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi semua Unit Organisasi dan Kelompok Kerja (Pokja) PUG Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA pada masing-masing Unit Organisasi di

Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
2. Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

ROAD MAP PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2020-2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR SINGKATAN	4
KATA SAMBUTAN.....	6
KATA PENGANTAR	8
TIM PENYUSUN	10
I. PENDAHULUAN	13
I.1 Pengarusutamaan Gender dalam RPJMN 2020-2024	14
I.2 Capaian dan Tantangan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Nasional.....	17
I.3 Pengarusutamaan Gender dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024.....	20
I.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	23
I.5 Ruang lingkup Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	24
II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.....	25
II.1 Arah kebijakan	25
II.2 Strategi.....	26
III. TUJUAN DAN SASARAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	27
III.1 Tujuan	27
III.2 Sasaran.....	28
IV. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	29
IV.1 Infrastruktur yang responsif gender	29
IV.2 Kriteria Infrastruktur PUPR yang Responsif Gender	29
IV.3 Tujuh Prasyarat Pelaksanaan PUG PUPR.....	31
V. ROAD MAP PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024.....	35
V.1 Prinsip-prinsip Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024	35
V.2 Aspek-aspek TURBINBANGLAKWAS dalam Penyelenggaraan Infrastruktur	35

V.3 Kerangka Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	36
VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI	37
VII. LAMPIRAN: MATRIX ROAD MAP PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2020-2024	38
Lampiran 1: Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	39
Lampiran 2: Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Unit Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	47
Lampiran 2.1 Sekretariat Jenderal	47
Lampiran 2.2 Inspektorat Jenderal	50
Lampiran 2.3 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	52
Lampiran 2.4 Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol	60
Lampiran 2.5 Direktorat Jenderal Cipta Karya	68
Lampiran 2.6 Direktorat Jenderal Perumahan	72
Lampiran 2.7 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	81
Lampiran 2.8 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR	83
Lampiran 2.9 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	88
Lampiran 2.10 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	91

DAFTAR SINGKATAN

AKI	Angka Kematian Ibu
AKPM	Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APE	Anugrah Parahita Ekapraya
ASN	Aparatur Sipil Negara
BBWS/BWS	Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai
BPIW	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol
BP2BT	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
BPSDM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BUJT	Badan Usaha Jalan Tol
CK	Cipta Karya
Dirjen	Direktur Jenderal
Dit.	Direktorat
Ditjend	Direktorat Jenderal
DJPI	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FLPP	Penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
GAP	<i>Gender Analisis Pathway</i>
GBS	<i>Gender Budget Statement</i>
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IPA	Indeks Perlindungan Anak
IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
JP	Jam Pelajaran
KAK	Kerangka Acuan Kerja
KBGO	Kekerasan Berbasis Gender Online
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KemenKes	Kementerian Kesehatan
KIE	Komunikasi, Informasi dan Edukasi
K/L	Kementerian/Lembaga
KOTAKU	Kota Tanpa Kumuh
KPBU	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KSPN	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KTP	Kekerasan Terhadap Perempuan
Lansia	Lanjut usia
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
M&E	Monitoring dan Evaluasi
Monev	Monitoring dan Evaluasi
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NSPK	Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria

PAMSIMAS	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PerMen	Peraturan Menteri
PFID	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah
PISEW	Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah
PKP	Pengembangan Kawasan Permukiman
PLBN	Pos Lintas Batas Negara
Pokja	Kelompok Kerja
PP	Peraturan Pemerintah
PPDPP	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
PPRG	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PSSPP	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
PUG	Pengarusutamaan Gender
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusdiklat	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
P3-TGAI	Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)
RAB	Rencana Anggaran Biaya
Renstra	Rencana Strategis
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
Satker	Satuan Kerja
SDA	Sumber Daya Air
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Surat Edaran
Sesditjen	Sekretaris Direktorat Jenderal
Setditjen	Sekretariat Direktorat Jenderal
SK	Surat Keputusan
SNVT	Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SSPIP	Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman
SSPP	Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
SSPSDA	Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TIP	Tempat Istirahat dan Pelayanan
TKK	Tenaga Kerja Konstruksi
TOT	<i>Training of Trainer</i>
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPS3R	Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle
TURBINBANGLAKWAS	Pengaturan, Pembinaan/Pemberdayaan, Pelaksanaan/Pembangunan dan Pengawasan
UKL/UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan
Unor	Unit Organisasi
UU	Undang-Undang

KATA SAMBUTAN



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting bagi tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang sekaligus juga merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran **Visi Indonesia 2045 yaitu: Indonesia Maju**. Dalam rangka menjalankan Visi Misi Presiden: *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, serta amanat dan arahan yang tertuang di dalam Instruksi Presiden No.9/2000 dan RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian PUPR 2020-2024 memuat berbagai arah kebijakan dan strategi, berikut tujuan dan sasaran Pengarusutamaan Gender yang menjadi landasan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyelenggarakan infrastuktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang responsif gender di tingkat Pusat dan Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 2020-2024 merupakan acuan bagi seluruh pimpinan dan jajaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tingkat Pusat dan Daerah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender sebagai bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dalam kegiatan penyelenggaraan infrastruktur guna mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik perempuan maupun laki-laki termasuk anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok rentan lainnya.

Dengan disusunnya Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender maka setiap unit organisasi/Kelompok Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur yang responsif gender secara lebih terintegrasi, terkoordinasi, terpadu, transparan, efisien dan efektif. Pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender yang tertuang di dalam Road Map ini telah memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan semua kelompok masyarakat, serta melibatkan partisipasi semua pihak dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip dan aspek-aspek penyelenggaraan infrastruktur, yaitu di dalam aspek pengaturan, pembinaan, pembangunan/pelaksanaan dan pengawasan (Turbinbanglakwas), yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

Tim Pengarusutamaan Gender, termasuk Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Unit Sekretariat dan seluruh Kelompok Kerja (Pokja) PUG-PUPR, serta semua pimpinan dan jajarannya memainkan peranan penting atas keberhasilan dan prestasi yang telah dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan pengarusutamaan gender selama ini, termasuk dalam menyusun Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 2020-2024. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerja keras, dukungan dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Harapan saya semoga dengan disusunnya Road Map Pengarusutamaan Gender

ini, semakin banyak lagi keberhasilan-hasilan yang akan dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan kesetaraan gender untuk lima tahun ke depan ini.

Prestasi dan keberhasilan yang telah diraih selama ini, termasuk dalam penyusunan Road Map Pengarusutamaan Gender tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan kerja sama dengan seluruh mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Khususnya, dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Australia atas kerjasama, dukungan dan bantuan teknis yang telah diberikan sehingga Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 dapat tersusun dengan baik. Semoga kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Australia dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui penyelenggaraan infrastruktur yang responsif gender dapat terus berlanjut dan semakin meningkat.

Semoga Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi semua pimpinan, pembuat kebijakan dan pengambil keputusan beserta jajarannya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tingkat Pusat dan Daerah. Selain itu Road Map ini dapat menjadi gambaran bagi mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang program/rencana kerja Kementerian PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagi penyelenggaraan infrastruktur yang responsif gender, guna mendukung tercapainya kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASOEKI HADIMULJONO

KATA PENGANTAR



Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah menetapkan **Pengarusutamaan Gender (PUG)** beserta tiga Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan lainnya, yaitu: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*); Modal Sosial Budaya; dan Transformasi Digital merupakan bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, yang menjadi katalis pembangunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif, guna mempercepat pencapaian target-target dari pembangunan di setiap sektor dan wilayah untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

Sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024; di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditegaskan kembali bahwa: *“Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan”*

Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 disusun sebagai wujud komitmen yang kuat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan amanat tersebut untuk mewujudkan kesetaraan gender guna terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia sebagaimana ditegaskan juga di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024. Selain itu, untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkelanjutan dibutuhkan dorongan secara terus menerus, agar keberhasilan-keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang responsif gender pada lima tahun ke depan dapat terus meningkat.

Dokumen ini adalah acuan bagi seluruh pimpinan beserta jajaran dibawahnya dalam melaksanakan PUG di masing-masing unit organisasi/Unor dan kelompok kerja/Pokja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang ditujukan untuk memetakan, menjabarkan dan mempercepat serta memonitor pelaksanaan PUG di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memperhatikan program strategis dan prioritas yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, serta aspek-aspek Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan/Pembangunan

dan Pengawasan (TURBINBANGLAKWAS) dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Roadmap ini disusun melalui proses yang partisipatif, baik melalui *Focus Group Discussion (FGD)* maupun konsultasi yang melibatkan seluruh unit organisasi dan Tim/Pokja PUG, serta berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pimpinan beserta jajarannya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Australia sebagai mitra kerja, dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024.

Semoga Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dapat dijadikan acuan oleh seluruh pimpinan dan jajaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baik di tingkat Pusat maupun Daerah dan bermanfaat bagi kita semua dalam mempercepat pelaksanaan PUG melalui penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang responsif gender, guna terwujudnya kesetaraan gender serta pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia di masa depan.

Plt. SEKRETARIS JENDERAL

PROF(R) DR. IR. ANITA FIRMANTI EKO SUSETYOWATI, M.T

ROAD MAP PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024

TIM PENYUSUN

PENGARAH:

- Prof. (R) Dr. Ir. Anita Firmanti Eko Susetyowati, MT.
- Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE.
- Ir. Sudirman, MM.
- Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng.
- Ir. T. Iskandar, M.T.

PENULIS:

- Pandu Gunadi Atmosukarto, ST, MUM.
- EE Fitri Herwanti, SE, MT.
- M. A. Faishol Zuhri, S.Kom.
- M. Arifin, ST, M.Si.
- Ir. Lilla Noerhayati Soedirman.
- Ir. Ineke Indrarini, M.Eng.Sc., MM.
- Dra. Endah Trista Agustiana, M.A, PhD.
- Yana Castiliana S, ST, MT.

KONTRIBUTOR:

Sekretariat Jenderal

- Ir. Asep Arofah Permana, MM., M.T.
- R. Endra Saleh Atmawidjaja, S.T., M.Sc., DEA.
- Ir. Sriyanto, SE., M.T.
- Riono Suprpto, S.E., S.T., M.T
- Nazib Faizal, S.T., M.Sc.
- Yohanes Richwanto, ST
- Maretha Ayu K, ST, MT, M.Sc.
- Eukharisto Mandik, ST, MPA.
- Dr. Erlina Kartika Sari.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

- Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA.
- Ir.Agung Djuhartono, CES.
- Ir Edy Juharsyah, MTec.
- Niken Puspitasari, ST., M.Sc
- Dr. Isnaeni Murdi Hartanto, ST, M.Sc

Direktorat Jenderal Bina Marga

- Ir. Subaiha Kipli, M.T.
- Ir. Miftachul Munir, M.T.
- Wilan Oktavian, ST, MPPM.
- Gita Dinarsanti, SE., M.E.
- Ramah Pita Manullang, ST., MEnvSus.

Direktorat Jenderal Cipta Karya

- Ir. Edward Abdurachman, Msc.
- Ir. Maryoko Hadi Dipl.Eng., M.T.
- Tommy Permadhi, ST., M.T.
- Azibi Taufik Jauhari, ST., M.Sc
- Elvia Nasrul, SS., MM.

Direktorat Jenderal Perumahan

- Ir. Dwityo Akoro Soeranto, MURP.
- Roem Indraningsih, ST., M.T.
- Ir. Muria Istamtiah, MBA.
- Tati M Kacaribu, ST.
- Sutriyah, S.Si.
- Santi vidyandani, ST

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

- Ir. Irma Yanti, MT.
- Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna, SE., MT.
- Agus Sulaeman, ST., MM.
- Eko Suhendratma, S.Si., MA.
- SN. Permana Lazuardy, SE., MM.
- Kurniawan Khristianto, SE., MM.
- Dra. Diah Parahita.
- Tantra Rifai, ST.
- Rahmawati Waluyaningsih., S. Kom., MM.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

- Dewi Chomistiana ST., M.Sc.
- Budi Setiawan, ST., MM.
- Dyah Sitaresmi Budiarti, ST., MPWK., MMG.
- Fahrial Farid, ST.
- R.J. Catherine I. Sihombing, S.Sos., M.I.Kom.

Inspektorat Jenderal

- Bimo Adi Nursanthyasto, S.T., MBA.
- Kaeshar Eksa, S.T., M.Eng.
- Aryo Hestuleksono, S.H., M.Hum.
- Ridah Fauzy, SH., MH.
- Widia Septiana, SE.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- Ir. Firman Hatorangan Napitupulu, MURP.
- Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., PhD.
- Auliya Ul Fikry, S.Sos., M.A., MSE.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Ir. Herman Suroyo, MT.
- Hary Prasetya, ST, M.Sc.
- Leny Riajelita, S.Kom, MT.
- M. Fakhry Aulia, S.Pd.
- Nurul Wulan Septianti, SE.
- Intan Puspitasari, SAB, MAB.

Badan Pengatur Jalan Tol

- Ir. Mahbullah Nurdin, MM.

EDITOR

- Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negri
- Unit Sekretariat Tim Pengarusutamaan Gender PUPR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1764 /KPTS/M/2020
TENTANG
ROADMAP PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, menetapkan bahwa tujuan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 adalah:

“Mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting bagi tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025, melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pemerintah Indonesia menetapkan Visi Misi Presiden RPJMN 2020–2024, Visi Indonesia 2045, sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, serta 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan.

RPJMN 2020-2024 merupakan landasan bagi tercapainya tujuan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. RPJMN 2020-2024 juga merupakan titik tolak untuk mencapai **sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu: Indonesia Maju.**

Visi Presiden

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

**Visi Indonesia 2045:
“Indonesia Maju”**

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”

Sumber: Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut meliputi:

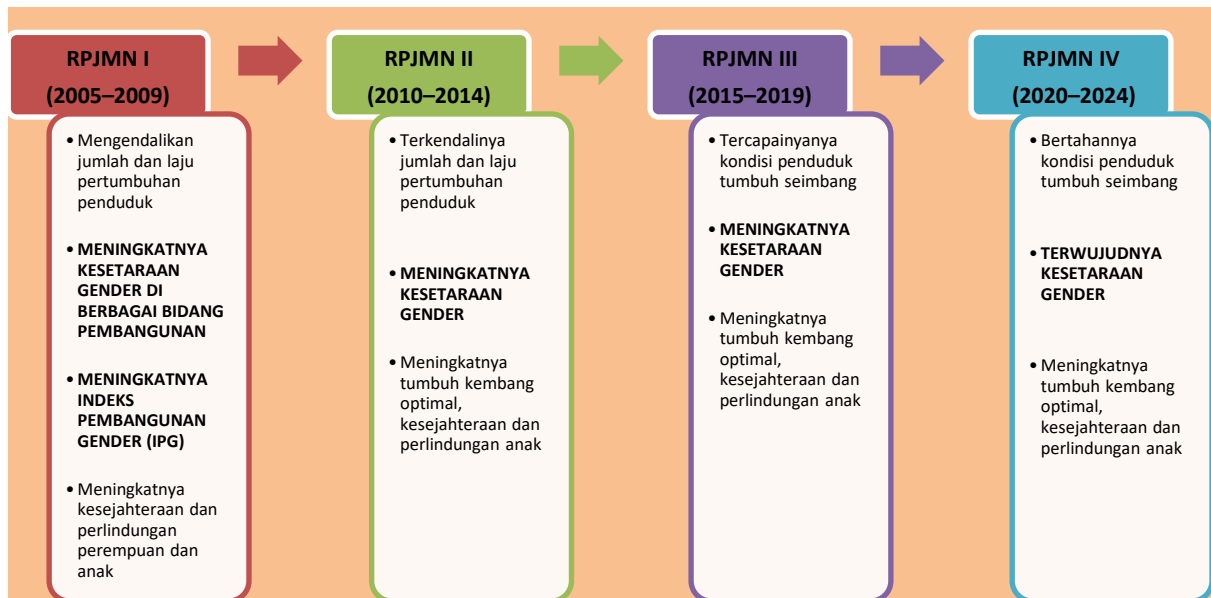
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia.
2. Pembangunan Infrastruktur.
3. Penyederhanaan Regulasi.
4. Penyederhanaan Birokrasi.
5. Transformasi Ekonomi.



Sumber: Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, hal. I.12

I.1 Pengarusutamaan Gender dalam RPJMN 2020-2024

Untuk mewujudkan kesetaraan gender secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam proses pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam setiap tahapan RPJMN, mulai dari RPJMN I (2005-2009) sampai dengan RPJMN IV (2020-2024).



Sumber: Disarikan dari Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2007). Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 juga menetapkan bahwa **Pengarusutamaan Gender (PUG)** merupakan salah satu dari 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

4 (Empat) Pengarusutamaan Dalam RPJMN 2020-2024



Sumber: Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Keempat pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu: 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs); 2) Pengarusutamaan Gender; 3) Modal Sosial Budaya; 4) Transformasi Digital merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan 7 Agenda Pembangunan di Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Sebagaimana ditegaskan dalam RPJMN 2020-2024, PUG dan pengarusutamaan lainnya merupakan bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, yang dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Lebih lanjut ditegaskan juga di dalam RPJMN 2020-2024 bahwa PUG dan pengarusutamaan lainnya akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, yang bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil, meningkatkan efisiensi tata kelola, serta adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya dilakukan secara inklusif.

RPJMN 2020-2024 menegaskan bahwa Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan Strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan

mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter merupakan salah satu tujuan dari Pembangunan Indonesia 2020-2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, RPJMN 2020-2024 menegaskan bahwa dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, anak dan pemuda serta pemenuhan hak dan perlindungan bagi mereka sebagai kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik menjadi sangat penting dalam rangka menjamin kualitas hidup, terhindar dari berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi dan berbagai tindak kekerasan, sehingga mereka dapat berperan dan berpartisipasi, memperoleh akses dan kontrol dalam pembangunan serta memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan secara adil dan setara.

Untuk itu kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia

Pengarusutamaan Gender dalam RPJMN 2020-2024

“Strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan”.

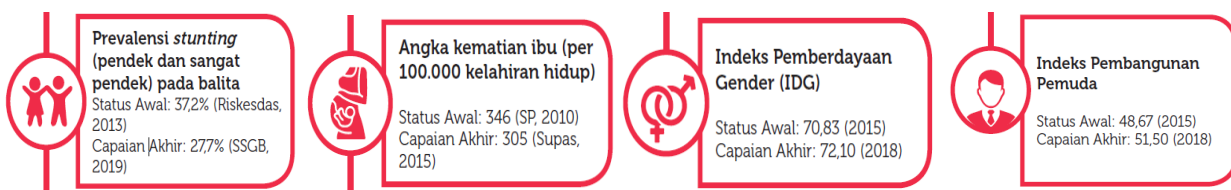
Sumber: Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, hal. I.41

tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

I.2 Capaian dan Tantangan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Nasional

Selama periode 2015-2019, berbagai capaian dalam pembangunan SDM dan kesetaraan gender telah banyak dihasilkan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari berbagai indikator seperti¹:

- Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari 70,83 di tahun 2015 menjadi 72,10 di tahun 2018.
- Turunnya prevalensi stunting pada balita, dari 38,2% (2013) menjadi 27,7% (2019)
- Turunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 346/100.000 (2010) kelahiran hidup menjadi 305/100.000 kelahiran hidup (2015).
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda, dari 48,67 di tahun 2015, menjadi 51,50 di tahun 2018



Sumber: Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Namun, berbagai tantangan masih banyak dihadapi dalam upaya peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan, anak dan pemuda. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif². Hal ini antara lain ditandai dengan³:

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2018 baru mencapai 90,99 dan 72,10.
- Indeks Ketimpangan Gender (*Gender Inequality Index*) di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, dimana Indonesia merupakan negara ketiga terendah di ASEAN dan berada di peringkat 104 dari 162 negara yang diukur.
- Di bidang ketenagakerjaan, data Sakernas (Agustus 2019) menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan baru mencapai 51,89 persen jauh lebih rendah dibandingkan TPak laki-laki sebesar 83,13 persen. Data Sakernas, Agustus 2018 juga menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lapangan kerja formal juga masih sangat rendah yaitu 34,22 persen dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai 65,78 persen.
- Pelaksanaan strategi PUG menghadapi berbagai tantangan, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: penerapan kebijakan, peranti analisis, serta komitmen dan

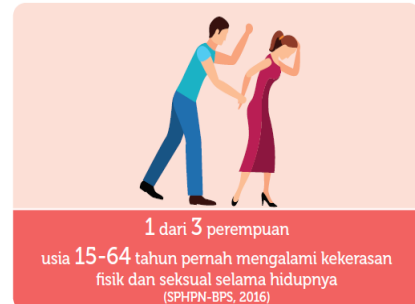
¹ Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

² Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

³ Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

dukungan politik terhadap kesetaraan gender yang masih belum optimal, pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di provinsi, kabupaten/kota, dan desa masih rendah dan belum seragam, serta kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan PUG, terutama SDM serta penyediaan dan pemanfaatan data gender di dalam setiap tahapan pembangunan masih belum memadai.

Berbagai tindak Kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang terus meningkat juga masih menjadi salah satu tantangan berat bagi upaya tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2016, 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual selama hidupnya. Pada periode 2018-2019 terdapat peningkatan sebanyak 14 persen kasus KTP yang dilaporkan, dari 348.466 kasus pada tahun 2018 menjadi 406.178 kasus pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, 71 persen adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 28 persen adalah kekerasan di komunitas seperti perkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual.⁴ Perempuan juga semakin rentan mengalami kekerasan pada situasi darurat dan bencana. Kekerasan pada pekerja migran perempuan juga masih terjadi mulai dari pemberangkatan, transit, dan pemulangan (Komnas Perempuan, 2019).⁵



Jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga masih tinggi dengan modus yang semakin kompleks. Jumlah korban TPPO pada tahun 2018 mencapai 297 orang di mana 70 persen diantaranya adalah perempuan dan anak perempuan (Bareskrim Polri, 2019). Perkembangan teknologi juga membuka peluang terjadinya kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Sepanjang 2017, terdapat 65 kasus KBGO dalam berbagai bentuk, antara lain pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen daring (*online recruitment*).⁶



⁴ Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

⁵ Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

⁶ Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, juga masih mengalami banyak tantangan. Pada tahun 2018, Indeks Perlindungan Anak baru mencapai 62,7; terdapat sekitar 61,7 persen laki-laki dan 62 persen perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (SNPHAR, 2018). Data Susenas (2018) menunjukkan bahwa 16,4 persen anak belum memiliki akta kelahiran, 11,21 persen perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, dan sekitar 7,05 persen anak berusia 10-17 tahun yang bekerja. Selain itu, sekitar 59,2 persen anak di dalam lapas belum mendapatkan akses pendidikan (Kementerian Hukum dan HAM, 2019).⁷



Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan juga belum optimal. Hanya 6,7 persen pemuda yang pernah memberikan saran/pendapat dalam kegiatan pertemuan dan hanya 6,4 persen terlibat aktif dalam kegiatan organisasi (Susenas, 2018). Penyalahguna narkoba usia kurang dari 30 tahun masih lebih tinggi dari usia lebih dari 30 tahun, yaitu 3,0 berbanding 2,8 (BNN, 2017). Sebesar 63,8 persen jumlah infeksi HIV baru terjadi pada rentang usia 15–19 tahun dan sekitar 56,5 persen terjadi pada pemuda dengan rentang usia 20–24 tahun (Kemenkes, 2018).⁸

Dalam rangka peningkatan kesetaraan gender, kualitas anak, perempuan dan pemuda, pemerintah menetapkan indikator, sasaran/ target yang akan dicapai selama lima tahun kedepan sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2020-2024.

Tabel 1: Indikator dan Sasaran/Target Peningkatan Kesetaraan Gender, Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda 2020-2024

No	Indikator	Baseline 2019	Sasaran/Target 2024
1.	Indeks perlindungan Anak (IPA)	62,72 (2018)	73,49
2.	Proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	11,21 (Susenas, 2018)	8,74
3.	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7 Perempuan: 62 (SNPHAR, 2018)	Menurun
4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,99 (2018)	91,39
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,10 (2018)	74,18
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	51,89	55,00
7.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	9,40 (SPHPN, 2016)	Menurun
8.	Indeks Pembangunan Pemuda	51,50 (2018)	57,67

Sumber: Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, hal. IV.20

⁷ Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

⁸ Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Untuk mengatasi tantangan dan mencapai target di atas, di dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dan strategi bagi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang meliputi⁹:

1. Penguatan kebijakan dan regulasi, percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha.
3. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan.
4. Peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.



I.3 Pengarusutamaan Gender dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas, penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan produktif, dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional serta peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).¹⁰



⁹ Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

¹⁰ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

Dalam rangka menjalankan amanat dan arahan yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 adalah: ¹¹

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, Pengarusutamaan Gender telah diintegrasikan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 memuat berbagai arah kebijakan dan strategi, berikut tujuan dan sasaran Pengarusutamaan Gender yang menjadi landasan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyelenggarakan infrastruktur PUPR yang responsif gender baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Mengacu kepada arahan RPJMN 2020-2024, visi dan misi serta tugas dan fungsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024, dijelaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah¹²:

Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

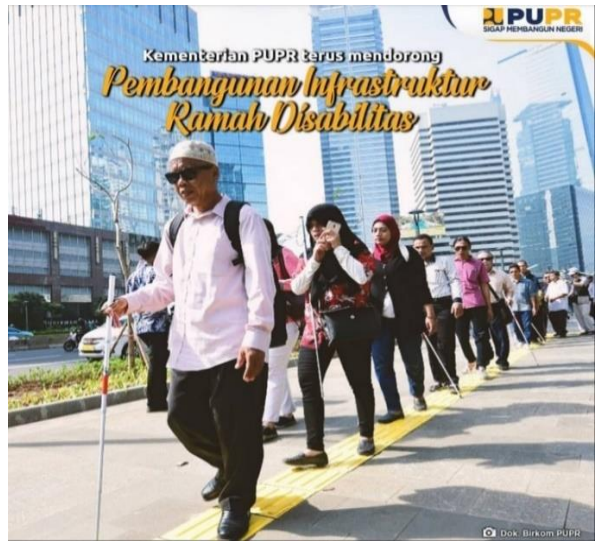
“Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (termasuk orang lanjut usia, pemuda, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan”.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, hal. 21.)

¹¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

¹² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

Selama periode 2015-2019 dan periode-periode sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui pelaksanaan PUG telah melakukan berbagai upaya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi terselenggaranya infrastruktur PUPR yang responsif gender guna mendukung pencapaian kesetaraan gender. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program penyelenggaraan infrastruktur yang responsif gender di bidang pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), penyelenggaraan jalan, pembangunan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan, pembinaan SDM, pengendalian dan pengawasan serta tata kelola penyelenggaraan pembangunan.



Sejak tahun 2008, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan predikat yang terus meningkat. Pada tahun 2008 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperoleh penghargaan APE dengan peringkat Pratama, selanjutnya menerima penghargaan APE dengan peringkat Madya pada tahun 2009 dan 2010, Peringkat Utama pada tahun 2011, 2012, 2013, serta peringkat Mentor pada tahun 2014, 2016 dan 2018. Penghargaan ini merupakan wujud pengakuan dari Pemerintah Indonesia atas keberhasilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan nasional.



Dalam rangka mendukung upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional dan kesetaraan gender sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024, maka program/kegiatan penyelenggaraan *"Infrastructure for all"* yang responsif gender, terintegrasi, efektif dan efisien di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat perlu terus dilanjutkan dan diperkuat, yang dituangkan di dalam Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024.



I.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Maksud:

- Memberikan acuan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Unor/Pokja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan:

- a. Memetakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Menyusun dan menjabarkan tahapan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memperhatikan program strategis dan prioritas yang tertuang dalam Renstra dalam aspek pengaturan, pembinaan/pemberdayaan, pelaksanaan/pembangunan dan pengawasan (TURBINBANGLAKWAS) tahunan.
- c. Mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

I.5 Ruang lingkup Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ruang lingkup Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 meliputi hal sebagai berikut:

1. Road Map pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Road Map pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit organisasi (Unor) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penyusunan Road Map Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi: *pengaturan, pembinaan/pemberdayaan, pelaksanaan/pembangunan, pengawasan (TURBINBANGLAKWAS), dengan memperhatikan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender: 1) Komitmen; 2) Kebijakan; 3) Kelembagaan; 4) Sumber daya (sumber daya manusia dan dana), 5) Data terpilah, 6) Alat Analisa; 7) Peran serta masyarakat*



II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengacu kepada kebijakan-kebijakan nasional yang dituangkan dalam SDGs, RPJP, RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024. RPJMN 2020-2024 mengamanatkan bahwa untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender.

II.1 Arah kebijakan

Sesuai dengan arahan arahan pengarusutamaan pembangunan di dalam RPJMN 2020 – 2024 dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024, kebijakan pengarusutamaan gender PUPR meliputi¹³:

1. Perkuatan komitmen Kementerian PUPR dalam pelaksanaan PUG;
2. Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian PUPR;
3. Peningkatan pelaksanaan *infrastructure for all* yang memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan” bagi semua kelompok baik perempuan dan laki-laki-laki, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, suku-suku terasing dan kelompok rentan lainnya secara setara dan adil;
4. Peningkatan pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang: komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan (POKJA dan *Focal Point*) di tingkat pusat dan daerah; kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia sumber dana; data terpilah; alat analisa gender (*Gender Analysisist Pathway/GAP*) untuk penyusunan PPRG; peran serta masyarakat dengan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak;
5. Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender;
6. Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender terutama dalam aspek manfaat hasil-hasil pembangunan, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG.

¹³ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, hal. 66

II.2 Strategi

Mengacu kepada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024, kebijakan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut¹⁴:

1. Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang responsif gender (NSPK);
2. Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender;
3. Peningkatan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG);
4. Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan Kelompok kerja (POKJA) dan *Focal Point*, serta peningkatan kapasitas SDM, melalui berbagai program pelatihan gender, PUG dan PPRG di tingkat pusat dan daerah;
5. Peningkatan penyebarluasan informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media cetak, elektronik, pameran, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain;
6. Pengembangan inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian-kajian dan fakta-fakta lapangan;
7. Peningkatan kerjasama dengan multi pihak (K/L), pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga-lembaga nasional dan internasional, donor, pihak swasta, masyarakat sipil dan pihak pemangku kepentingan lainnya) melalui perjanjian Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* (MoU), dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
8. Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program kegiatan yang responsif gender.



¹⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, hal. 66.

III. TUJUAN DAN SASARAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

III.1 Tujuan

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024, disebutkan bahwa tujuan umum Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah¹⁵:

Tujuan Umum Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

“Memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah responsif gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”

Dalam rangka mencapai tujuan umum di atas, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya ditujukan untuk¹⁶:

1. Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) di seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan mitra kerja (pemangku kepentingan dan masyarakat) yang **memahami dan melaksanakan** penyelenggaraan infrastruktur yang responsif gender bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tingkat Pusat maupun Daerah.
2. Mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang memenuhi kriteria “Infrastruktur untuk Semua” (*“Infrastructure for all”*), inklusif, memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, memenuhi kebutuhan dasar, ramah lingkungan dan berkelanjutan secara adil dan setara.



¹⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, hal. 66

¹⁶ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020). Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

III.2 Sasaran¹⁷

1. ***Meningkatnya pemahaman*** tentang PUG dan penyelenggaraan infrastruktur yang responsif gender di tingkat Pusat dan Daerah bagi seluruh ASN di jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta mitra kerja (pemangku kepentingan dan masyarakat).
2. ***Meningkatnya pengintegrasian perspektif gender sebagai budaya internal*** di masing-masing unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyelenggaraan infrastruktur di tingkat Pusat dan Daerah.
3. ***Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat*** di tingkat Pusat dan Daerah yang telah memperhatikan kebutuhan, permasalahan, pengalaman dan aspirasi masyarakat, baik perempuan dan laki-laki, termasuk didalamnya anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelompok rentan lainnya secara adil dan setara dalam memperoleh akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pembangunan, kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan dalam memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan.



¹⁷ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020). Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

IV. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

IV.1 Infrastruktur yang responsif gender

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional setiap Kementerian/Lembaga diharuskan melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Dalam konteks penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendefinisikan **infrastruktur yang responsif gender** adalah¹⁸:



Infrastruktur yang Responsif Gender

“Seluruh kebijakan/program/kegiatan bidang infrastruktur PUPR yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, hambatan, kesulitan, permasalahan, dan aspirasi kelompok perempuan dan laki-laki termasuk anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelompok rentan lainnya secara adil dan setara”

IV.2 Kriteria Infrastruktur PUPR yang Responsif Gender



Berdasarkan prinsip **Infrastruktur untuk Semua (*Infrastructure for All*)**, kriteria infrastruktur PUPR yang responsif gender harus menjadi identitas yang melekat dalam pelaksanaan Road

¹⁸ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020). Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Map kegiatan PUG bidang PUPR. Adapun yang dimaksud dengan kriteria infrastruktur PUPR yang responsif gender tersebut adalah:

- **Dapat dimanfaatkan oleh semua:** penyelenggaraan infrastruktur harus dapat dimanfaatkan oleh semua kelompok masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok rentan lainnya.



- **Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan:** penyelenggaraan infrastruktur harus memberikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi perempuan, laki-laki, anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat rentan lainnya (misalnya: penerangan jalan, bebas banjir, desain bangunan yang aman, desain trotoar yang bebas halangan).



- **Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pemenuhan kebutuhan dasar:** penyelenggaraan infrastruktur ditujukan untuk memberikan kesetaraan dan keadilan gender dalam aksesibilitas terhadap pelayanan kebutuhan dasar (*basic needs*) bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok rentan lainnya.



- **Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan:** penyelenggaraan infrastruktur harus dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan perempuan, laki-laki, termasuk anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok rentan lainnya.



IV.3 Tujuh Prasyarat Pelaksanaan PUG PUPR

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baik di tingkat Pusat maupun Daerah perlu mengacu kepada pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG sebagai berikut:

1. **Komitmen:** Untuk mempercepat pelaksanaan PUG di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperlukan adanya komitmen dari pimpinan Kementrian/lembaga (Menteri/Sekjen/Eselon I/Eselon II). Komitmen ini antara lain tertuang dalam:

- Pencanaan Implementasi PUG di Kementerian PUPR bersama-sama dengan KPPPA pada tanggal 18 Desember 2008 yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I, II dan III.
- Pembentukan Tim PUG sejak tahun 2009 sebagai bentuk komitmen pembentukan kelembagaan untuk percepatan pelaksanaan PUG.
- Pelaksanaan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan multi pihak yang merupakan wujud komitmen bersama untuk mensinergikan perencanaan, peningkatan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran agar responsif gender dengan multi pihak (K/L dan mitra kerja).



2. **Kebijakan:** Merupakan wujud komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan PUG di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta produk-produk pengaturan yaitu: ***Norma, Standar, Pedoman/Panduan, Kriteria/Petunjuk Pelaksanaan/Manual (NSPK)*** pada setiap program, kegiatan dari masing-masing Unit Organisasi (Unor) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Produk-produk pengaturan tersebut antara lain ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (PerMen), Surat Edaran (SE) Menteri, Peraturan Direktorat Jenderal/Direktur dan sebagainya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Pasal 761

*Setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan dengan memperhatikan **perspektif gender**.*

3. **Kelembagaan:** Struktur organisasi pelaksanaan PUG, yang ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga/unit organisasi dengan SDM yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan PUG dibentuk Tim PUG Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Tim Pokja PUG di masing-masing unit organisasi melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. **Sumber Daya:** Dalam melaksanakan PUG diperlukan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber dana.
 - **Sumber Daya Manusia:** Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang responsif gender dibutuhkan peningkatan kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan keterampilan teknis tentang konsep gender, pelaksanaan PUG dan PPRG yang terintegrasi dalam tugas dan fungsi masing, melalui kegiatan sosialisasi, workshop, pelatihan, *Focus Group Discussion* (FGD), dan lain-lain.



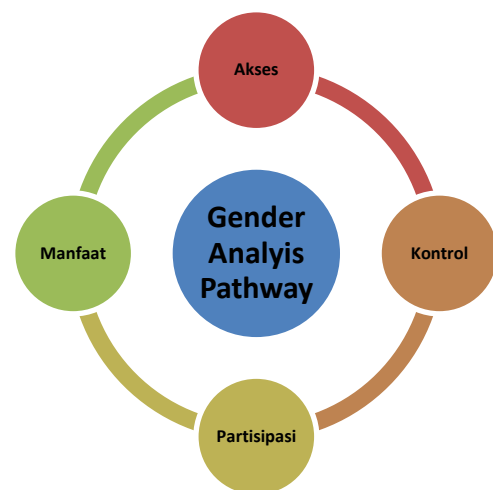
- **Sumber dana:** Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk dan Penyusunan RKAK/L, setiap Kementerian/Lembaga diharuskan menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dengan menyiapkan analisis gender. Kementerian PUPR menggunakan *Gender Analisis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS), sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan program/kegiatan yang responsif gender. Sumber dana dapat berasal dari APBN, APBD, pihak swasta, lembaga donor, masyarakat dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.



data terkait SDM di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, data ketenagakerjaan konstruksi, serta keterlibatan SDM pada proses kegiatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, dan juga sebagai pelaku dan penerima manfaat.

6. **Alat Analisa:** alat analisa gender digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan membuat rencana aksi untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan gender dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. termasuk dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan responsif gender.

Gender Analysis Pathway adalah salah satu model analisa gender yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi isu kesenjangan gender sebagai dasar bagi penyusunan rencana aksi (mengurangi/menghilangkan isu kesenjangan) serta menyusun indikator *outcome*/manfaat dari program/kegiatan responsif gender.



Untuk memahami isu-isu kesenjangan gender dan menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan responsif gender, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan kerangka alat analisa gender sebagai berikut: **Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat (AKPM)**.

- **Akses:** adil/setara bagi perempuan dan laki-laki termasuk anak-anak, lansia, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelompok rentan lainnya dalam memperoleh akses terhadap peluang atau kesempatan dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- **Kontrol:** adil/setara bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, lansia, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelompok rentan lainnya dalam menjalankan fungsi kontrol/pengambilan keputusan terhadap penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.



- **Partisipasi:** adil/setara bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, lansia, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelompok rentan lainnya untuk berperan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- **Manfaat:** adil/setara bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, lansia, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelompok rentan lainnya dalam memanfaatkan hasil penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.



7. **Peran Serta Masyarakat:** adanya peran serta aktif masyarakat baik perempuan maupun laki-laki, termasuk lansia, anak-anak, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok rentan lainnya, serta perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga masyarakat baik sebagai pelaku maupun sebagai penikmat pembangunan untuk memperoleh akses dan kontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat hasil-hasil penyelenggaraan infrastruktur yang responsif gender secara setara, adil dan merata.



v. ROAD MAP PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024.

Dalam melaksanakan kegiatan PUG, dibutuhkan Road Map yang menjadi acuan bagi seluruh Unor/Pokja PUG PUPR dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di tahun 2020-2024 sesuai dengan prinsip-prinsip dan aspek-aspek penyelenggaraan infrastruktur PUPR yaitu: ***Pengaturan, Pembinaan/Pemberdayaan, Pelaksanaan/Pembangunan dan Pengawasan (TURBINBANGLAKWAS).***

V.1 Prinsip-prinsip Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

Prinsip-prinsip Road Map pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Mendukung target/goal SDGs, RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024, program prioritas nasional, program strategis dan regular pada masing-masing unit organisasi.
2. Dilaksanakan secara bertahap, fleksibel dan adaptif apabila terjadi perubahan struktur organisasi.
3. Merupakan tindak lanjut hasil review pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di bidang PUPR tahun 2015-2019.

V.2 Aspek-aspek TURBINBANGLAKWAS dalam Penyelenggaraan Infrastruktur

Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender disusun dan dilaksanakan berdasarkan aspek-aspek ***Pengaturan, Pembinaan/Pemberdayaan, Pelaksanaan/Pembangunan dan Pengawasan (TURBINBANGLAKWAS).***



- **Pengaturan:** kebijakan, NSPK, Renstra, dan Masterplan.
- **Pembinaan/Pemberdayaan:** sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, kajian, manajemen dan pengembangan kapasitas SDM, pemetaan, pembentukan dan pengembangan kelembagaan, pemetaan asset, penyediaan dan pemanfaatan data terpilah, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

- **Pembangunan/Pelaksanaan:** penelitian/kajian, pra-studi kelayakan, studi kelayakan, UKL/UPL, amdal, andalalin, survey, investigasi, desain, perencanaan umum dan teknik, pembebasan lahan, pengawasan teknik/supervisi, rehabilitasi, peningkatan pembangunan (konstruksi), dan fisik penunjang.
- **Pengawasan:** monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender, manajemen pengendalian, kajian makro pengawasan, pengawasan lainnya.



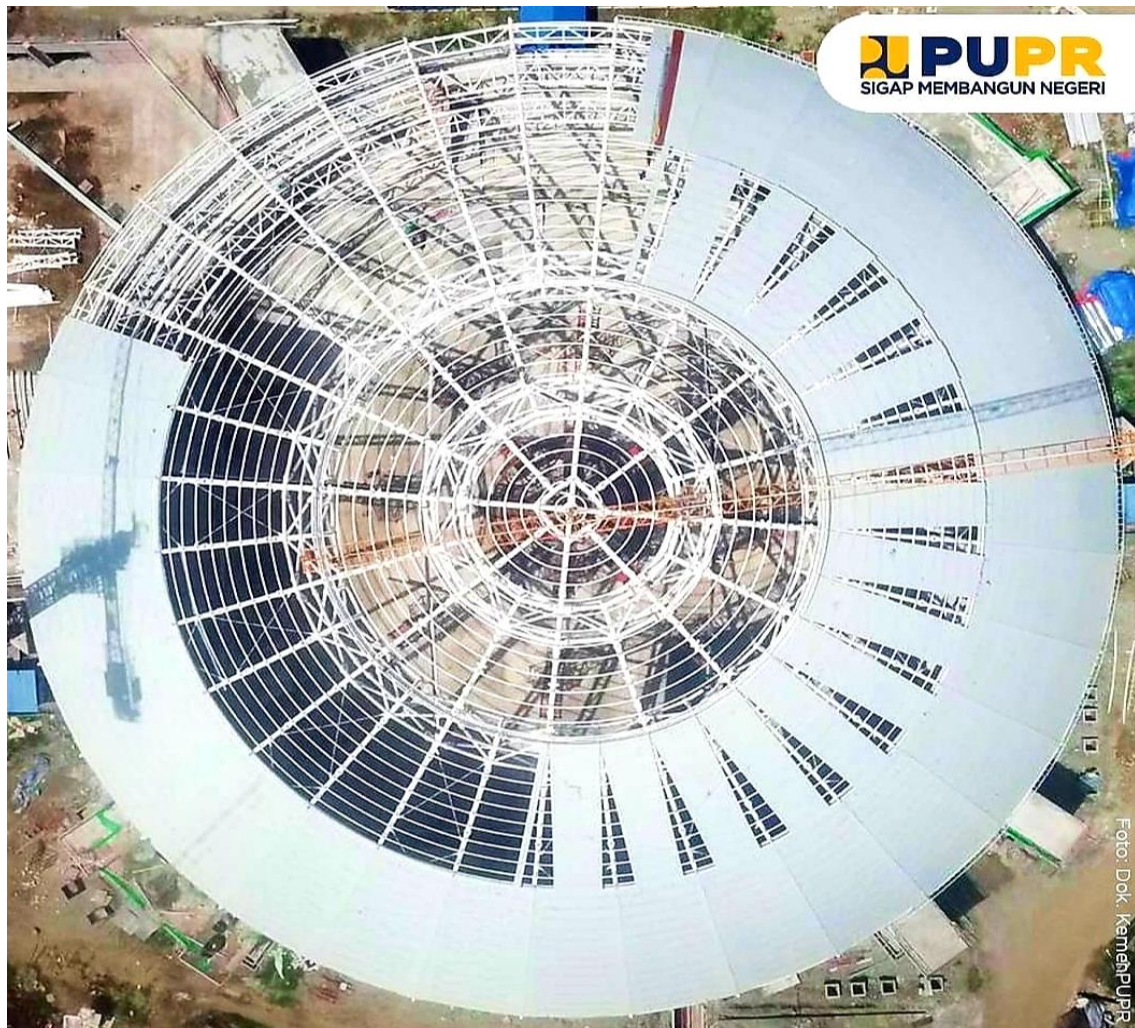
V.3 Kerangka Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit organisasi disusun berdasarkan isu kesenjangan gender yang melekat pada tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara keseluruhan.



VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PUG yang tertuang dalam Road Map Pengarusutamaan Gender dilakukan secara melekat oleh masing-masing unit kerja yang bertanggungjawab di bidang monitoring dan evaluasi (M & E) secara berkala 3 (tiga) bulanan dan akhir tahun anggaran. Laporan M & E berkala 3 (tiga) bulanan dan tahunan disiapkan oleh masing-masing Pokja dan disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana PUG melalui Unit Sekretariat PUG-PUPR.
2. Sekretariat PUG-PUPR melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan M & E melalui rapat-rapat koordinasi dan uji petik lapangan.
3. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan kegiatan PUG di masing-masing unit organisasi.
4. Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.



VII. LAMPIRAN MATRIX ROAD MAP PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024



Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROGRAM/KEGIATAN PUG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA ¹⁹	
PENGATURAN													
1.	Penyusunan/review NSPK terkait kegiatan responsif gender						Tim PUG/Pokja. Masing-masing Unor. Sekretariat PUG.						
2.	Review/penyusunan dan Legalisasi produk-produk hukum dan kebijakan terkait PUG PUPR (PerMen, SE, Pedoman, dll)						Biro/Bagian Hukum/ Tim Pokja PUG masing-masing Unor.						
3.	Review Renstra 2020-2024						Tim PUG/Pokja Masing-masing Unor Sekretariat PUG.						
4.	Penyusunan/Integrasi aspek gender ke dalam Renstra 2025-2029						Tim PUG/Pokja. Biro/Bagian Hukum. Masing-masing Unor. Sekretariat PUG.						

¹⁹ Sumber dana dapat berasal dari mitra kerja, KPBU, Masyarakat, BUMN, CSR, dan sebagainya.

PROGRAM/KEGIATAN PUG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA ¹⁹	
5.	Review Road Map PUG 2020-2024						Tim PUG/Pokja. Masing-masing Unor. Sekretariat PUG.						
6.	Penyusunan Road Map PUG 2025-2029						Tim PUG/Pokja. Biro/Bagian Hukum. Masing-masing Unor. Sekretariat PUG.						
PEMBINAAN													
7.	Pengembangan kapasitas SDM di Internal Kementerian PUPR, dalam pelaksanaan PUG PUPR (sosialisasi, diklat, TOT, refreshing, pendampingan, inovasi implementasi PUG)						Masing-masing Unor. Sekretariat PUG. BPSDM.						Sumber dana dapat berasal dari BPSDM dan/atau program/kegiatan yang terkait dengan aspek gender di masing-masing unit organisasi (Unor) serta sumber dana lainnya. Kegiatan pengembangan kapasitas diinisiasi oleh masing-masing Pokja/Unor Kegiatan pengembangan kapasitas SDM dapat dilakukan setiap tahun

PROGRAM/KEGIATAN PUG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA ¹⁹	
													dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan
8.	Pengembangan kapasitas SDM eksternal pada mitra kerja Kementerian PUPR, antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG-PUPR (fasilitasi, sosialisasi, pendampingan, kolaborasi)						Ditjen SDA. Ditjen Bina Marga. Ditjen Cipta Karya. Ditjen Bina Konstruksi. Ditjen Perumahan. Ditjen Pembiayaan Infrastrktur PUPR. BPSDM. Sekretariat PUG.						Sumber dana untuk kegiatan pengembangan kapasitas SDM berasal dari pihak eksternal/mitra kerja dan/atau pemohon (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan institusi lainnya) Kegiatan sesuai dengan permohonan dan kebutuhan masing-masing pihak eksternal/mitra kerja/pemohon.
9.	Pengembangan dan penguatan Pokja dan Focal Point PUG masing-masing Unor melalui kegiatan pelatihan/ToT, Workshop, FGD, pendampingan, dll						Masing-masing Unor. Sekretariat PUG. BPSDM.						Sumber dana dapat berasal dari BPSDM dan/atau program/kegiatan yang terkait dengan aspek gender di masing-masing unit organisasi (Unor) Kegiatan pengembangan

PROGRAM/KEGIATAN PUG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA ¹⁹	
													kapasitas diinisiasi oleh masing-masing Pokja/Unor Kegiatan pengembangan kapasitas SDM dapat dilakukan setiap tahun dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan
10.	Review dan pembaharuan materi-materi pengembangan kapasitas internal dan external SDM PUPR						Sekretariat PUG. BPSDM.						
11.	Penyusunan materi KIE dan sosialisasi kegiatan PUG PUPR pada mitra kerja Kementerian (Pemerintah Daerah, swasta, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat, dll) melalui media cetak dan media elektronik, pameran, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain.						Pokja PUG masing-masing Unor. Sekretariat PUG.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA ¹⁹	
12.	Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi pada kelompok marginal						Ditjen Cipta Karya. Ditjen SDA. Ditjen Perumahan. Ditjen Bina Konstruksi. Ditjen Bina Marga.						Sumber dana dapat berasal dari program/kegiatan yang terkait dengan aspek gender di masing-masing unit organisasi dan bekerjasama dengan Ditjen Bina Konstruksi Kegiatan diinisiasi oleh masing-masing Pokja/Unor dan berkerjasama dengan Ditjen Bina Konstruksi Kegiatan dapat dilakukan setiap tahun dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan
13.	Integrasi aspek-aspek gender termasuk analisa gender ke dalam program prioritas, program strategis, dan kegiatan Reguler di masing-masing Unor						Pokja PUG Masing-masing Unor. Sekretariat PUG.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA ¹⁹	
14.	Penyusunan dan pembaharuan data terpilah serta analisis gender sebagai dasar perencanaan, penganggaran dan kebijakan						Pokja PUG masing-masing Unor.						
15.	Penyiapan Dokumen ARG						Pokja PUG masing-masing Unor.						
16.	Penyusunan /pembaharuan profil kegiatan PUG PUPR						Pokja PUG masing-masing Unor. Biro Komunikasi Publik. Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sekretariat PUG.						
17.	Dokumentasi hasil pembangunan/ pelaksanaan kegiatan responsif gender di media cetak dan elektronik/website						Pokja PUG/Masing-masing Unor. Biro Komunikasi Publik. Pusat Data dan Informasi. Sekretariat PUG.						
PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN													

PROGRAM/KEGIATAN PUG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA ¹⁹	
18.	Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang responsif gender, termasuk Program Strategis Nasional, dan Program Prioritas Nasional dan regular.						Ditjen SDA. Ditjen Bina Marga. Ditjen Cipta Karya. Ditjen Perumahan. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Biro Komunikasi Publik. BPIW. Sekretariat PUG.						
PENGAWASAN (PEMANTAUAN DAN EVALUASI)													
19.	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan dan kegiatan PUG termasuk sarana prasarana perkantoran yang responsif gender di Kementerian PUPR						Inspektorat Jenderal. Pokja PUG di masing-masing Unor. Sekretariat PUG.						
20.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM di bidang PUG di internal dan eksternal (mitra kerja) PUPR termasuk materi-materi pelatihan/ToT, pendampingan bagi Pokja dan Focal point PUG PUPR						BPSDM. Sekretariat PUG.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA ¹⁹	
21.	Monitoring dan Evaluasi kelengkapan 7 prasyarat pelaksanaan PUG						Pokja PUG masing-masing Unor. Sekretariat PUG.						
22.	Pelaksanaan pengawasan kegiatan PUG/Audit Gender Kementerian PUPR						Inspektorat Jenderal. Masing-masing Unor/Pokja PUG.						

Sekretariat Jenderal

PROGRAM/KEGIATAN PUG SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
PENGATURAN													
1.	Penyusunan/review/legalisasi NSPK terkait kegiatan responsif gender						Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri. Biro Hukum. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah. Biro Kepegawaian dan Ortala.						
PEMBINAAN													
2.	Pengembangan kapasitas SDM di Internal Kementerian PUPR, dalam pelaksanaan PUG PUPR (sosialisasi, diklat, TOT, refreshing, pendampingan, inovasi implementasi PUG)						Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah.						
3.	Pengembangan kapasitas SDM eksternal pada mitra kerja Kementerian PUPR, antar Kementerian/Lembaga,						Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
	Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG-PUPR (fasilitasi, sosialisasi, pendampingan, kolaborasi)						Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah.						
4.	Pengembangan website PUPR						Pusat Data dan Teknologi Informasi.						
5.	Penyelenggaraan dan Pembinaan informasi publik						Biro Komunikasi Publik; Pusat Data dan Teknologi Informasi.						
6.	Dukungan Sekretariat PUG PUPR						Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.						
7.	Pembaruan/update data terpilah pelaku dan penerima manfaat						Pusat Data dan Teknologi Informasi.						
PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN													

PROGRAM/KEGIATAN PUG SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
8.	Peningkatan kesehatan pegawai dan keluarga termasuk pensiunan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						Biro Umum.						
9.	Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas bagi perempuan dan anak dalam mendukung pembangunan (ruang laktasi dan TPA)						Biro Umum.						
PENGAWASAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI													
10.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PUG PUPR						Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri. Biro Umum Pusat Data dan Teknologi Informasi. Biro Kepegawaian dan Ortala. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
PENGATURAN													
1.	Penyusunan Pedoman Pengawasan Responsif Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.						Sekretariat Inspektorat Jenderal.						
PEMBINAAN													
2.	Bimbingan Teknis Pelatihan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Gelombang I)						Sekretariat Inspektorat Jenderal.						
3.	Bimbingan Teknis Pelatihan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Gelombang II)						Sekretariat Inspektorat Jenderal.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
4.	Bimbingan Teknis Pelatihan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Gelombang III)						Sekretariat Inspektorat Jenderal.						
PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN													
5.	Pelaksanaan Reviu RKA-KL dan audit kinerja.						Sekretariat Inspektorat Jenderal.						
PENGAWASAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI													
6.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender						Sekretariat Inspektorat Jenderal.						

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

PROGRAM/KEGIATAN PUG DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
PENGATURAN													
1.	Background Study Renstra Ditjen SDA 2025-2029						Dit. SSPSDA.						
2.	Penyusunan konsep teknokratik Renstra Ditjen SDA 2025-2029						Dit. SSPSDA.						
3.	Penyusunan Road Map Pelaksanaan PUG Penyediaan Ditjen SDA 2025-2029						Dit. SSPSDA.						
PEMBINAAN													
4.	Penguatan kapasitas Focal Point pada masing-masing Direktorat, BBWS/BWS dan anggota POKJA di lingkungan Ditjen SDA						Dit. SSPSDA.						
5.	Updating Data Terpilah PUG Ditjen SDA (Pelaku dan Penerima Manfaat)						Seluruh Unit Eselon II di lingkungan Ditjen SDA.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
6.	Penyusunan GAP dan GBS pada masing-masing Direktorat dan BBWS/BWS di lingkungan Ditjen SDA						Seluruh Unit Eselon II, BBWS/BWS di lingkungan Ditjen SDA.						
7.	Pengembangan dan pengelolaan berita dokumentasi kegiatan PUG pada Website Ditjen SDA						Setditjen, Dit. SSPSDA.						
8.	Penyusunan Database terkait Updating Data Terpilah SDM di lingkungan Ditjen SDA (Pelaku dan Penerima Manfaat)						Seluruh Unit Eselon II di lingkungan Ditjen SDA.						
PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN													
Program Kerakyatan/Padat Karya													
9.	Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)						Dit. Bina OP.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
Kebencanaan													
10.	Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) in Central Sulawesi						Dit. Irigasi dan Rawa. Dit. Sungai dan Pantai. Dit. Air Tanah dan Air Baku.					Loan ADB	- Rehabilitasi Irigasi - Pengendalian Banjir - Rehabilitasi prasarana air baku
11.	JICA Sector Loan for Infrastructure for Central Sulawesi Recovery and Reconstruction						Dit. Irigasi dan Rawa. Dit. Sungai dan Pantai. Dit. Air Tanah dan Air Baku.					Loan JICA	- Rehabilitasi Irigasi - Pengendalian Banjir - Rehabilitasi prasarana air baku
12.	Urban Flood Control System Improvement in selected Cities Phase II						Dit. Sungai dan Pantai.					Loan Korea	Pengendalian Banjir
KSPN Super Prioritas													
	KSPN Danau Toba												
13.	Pembangunan Penyediaan Air Baku Kawasan Prapat						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
14.	Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Tongging						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
15.	Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Balige						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
16.	Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Bakara						Dit. Air Tanah dan Air Baku						
17.	Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Pulau Sibandang						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
18.	Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Tele						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
19.	Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Panggururan						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
20.	Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Merek						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
21.	Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Silalahi						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
	KSPN Borobudur												
22.	Penyediaan Air Baku Sumber Air Tanah						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
23.	Pembangunan SPAM Banyusoco						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
	KSPN Mandalika												
24.	Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Baku Bendungan Pengga di Kabupaten Lombok Tengah						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
25.	Pembangunan Penyediaan Air Baku dari Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
26.	Pembangunan Penyediaan Air Baku kawasan Gili di Kab. Lombok Utara						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
27.	Pembangunan Penyediaan Air Baku Pantai Gerupuk dan Daerah Penyangga di Kabupaten Lombok Timur						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
28.	Pembangunan Penyediaan Air Baku Kawasan Sekotong dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
	KSPN Labuan Bajo												
29.	Pembangunan Penyediaan Air Tanah untuk Air Baku di Labuan Bajo						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
30.	Pembangunan Air Baku Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
	KSPN Manado-Bunaken-Likupang												
31.	Pembangunan Tampung Air Hujan di Pulau Bunaken						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
32.	Pembangunan Prasarana Air Tanah untuk Air Baku di Likupang						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
33.	Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku KEK Likupang						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
34.	Pembangunan Prasarana Air Baku Kepulauan Bunaken Kota Manado						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
Kekeringan													
35.	Pembangunan Tampungan Air Hujan (PAH) pada Daerah Rawan Kekeringan						Dit. Air Tanah dan Air Baku.						
PENGAWASAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI													
36.	Pemantauan dan Evaluasi bersama Tim PUG PUPR terkait penerapan PUG dalam Pembangunan Infrastruktur PUPR						Seluruh Unit Eselon II di lingkungan Ditjen SDA.						
37.	Evaluasi Program dan Kegiatan Ditjen SDA yang Responsif Gender						Seluruh Unit Eselon II di lingkungan Ditjen SDA.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
38.	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (KAK, GAP, GBS)						Dit. SSPSDA.						
39.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan PUG dalam LAKIP						Dit. SSPSDA.						

Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol

PROGRAM/KEGIATAN PUG DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
PENGATURAN													
1.	Review dan Legalisasi Kelembagaan PUG PUPR di Ditjen. Bina Marga						Ditjen Bina Marga.						
2.	Review dan evaluasi NSPK yang Responsif Gender						Ditjen Bina Marga.						
3.	Penyusunan dan legalisasi, review panduan Monev PPRG Bina Marga						Ditjen Bina Marga.						
PEMBINAAN													
4.	Informasi implementasi PUG PUPR di Ditjen Bina Marga berbasis internet						Ditjen Bina Marga.						
5.	Updating Data Terpilah PUG PUPR SDM (Pelaku, dan Penerima manfaat) Infrastruktur PUPR						Ditjen Bina Marga.						
6.	Pemantapan pemahaman PUG Bidang Bina Marga Kementrian PUPR kepada balai besar/balai pelaksanaan						Ditjen Bina Marga.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
	2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
jalan nasional (stakeholder terkait lainnya)												
PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN												
7. Kegiatan Padat Karya; Pemeliharaan rutin jalan & jembatan						Ditjen Bina Marga & Balai Besar/Balai Jalan Nasional.						
8. Kegiatan Infrastruktur Responsif Gender/ Kegiatan Reguler						Ditjen Bina Marga & Balai Besar/Balai Jalan Nasional.						
- Penyusunan Dokumen Lingkungan,						Ditjen Bina Marga & Balai Besar/Balai Jalan Nasional.						
- Pembebasan lahan,						Ditjen Bina Marga & Balai Besar/Balai Jalan Nasional.						
- Pembangunan jembatan gantung.						Ditjen Bina Marga & Balai Besar/Balai Jalan Nasional.						Direktif
9. Pelaksanaan penyusunan Info terupdate / data terpilah / dokumen hasil pelaksanaan PUG						Ditjen Bina Marga.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
10.	Pembuatan Video/ leaflet/ Dokumentasi hasil pembangunan / pelaksanaan kegiatan PUG PUPR						Ditjen Bina Marga.						
11.	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender						Ditjen Bina Marga.						
12.	Review Renstra dan Road Map PUG 2020-2024						Ditjen Bina Marga.						
PENGAWASAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI													
13.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Padat Karya dalam Pemeliharaan rutin jalan & jembatan						Ditjen Bina Marga.						
14.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan						Ditjen Bina Marga.						
	- Penyusunan Dokumen Lingkungan,						Ditjen Bina Marga & Balai Besar/Balai Jalan Nasional.						
	- Pembebasan lahan						Ditjen Bina Marga & Balai Besar/Balai Jalan Nasional.						
	- Jembatan gantung.						Ditjen Bina Marga & Balai Besar/Balai Jalan Nasional.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
15.	Monitoring dan Evaluasi kelengkapan 7 prasyarat pelaksanaan PUG						Ditjen Bina Marga.						
16.	Pelaksanaan audit PUG						Ditjen Bina Marga.						

PROGRAM/KEGIATAN PUG BADAN PENGATUR JALAN TOL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
PENGATURAN													
1.	Tempat Istirahat dan Pelayanan setara gender (toilet penyandang cacat, toilet anak-anak, nursery room, parkir khusus wanita dan penyandang cacat, integrasi dengan daerah sekitar, dan lansekap pemandangan)						Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga.						BPJT mengusulkan ke Bina Marga, saat ini sedang proses review SPM di Ditjen BHP
PEMBINAAN													
2.	Tempat Istirahat dan Pelayanan setara gender (toilet penyandang cacat, toilet anak-anak, nursery room, parkir khusus wanita dan penyandang cacat, integrasi dengan daerah sekitar, dan lansekap pemandangan)						Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol.						Akan dilaksanakan dalam SPM rutin oleh Bina Marga dan BPJT
3.	Pengadaan tenaga kerja lokal dan disabilitas						Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol.						
PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN													

PROGRAM/KEGIATAN PUG
BADAN PENGATUR JALAN TOL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
4.	Tempat Istirahat dan Pelayanann (usulan pelaksanaan PUG)												
	- Review desain TIP yg sudah ada						Badan Usaha Jalan Tol, BPJT dan Bina Marga.					BUJT	
	- Toilet anak-anak, dan <i>nursery room</i>						Badan Usaha Jalan Tol, BPJT dan Bina Marga.					BUJT	
	- Parkir khusus wanita dan penyandang cacat						Badan Usaha Jalan Tol, BPJT dan Bina Marga.					BUJT	
	- Lansekap pemandangan						Badan Usaha Jalan Tol, BPJT dan Bina Marga.					BUJT	
	- Tempat istirahat sopir truk/kendaraan besar						Badan Usaha Jalan Tol, BPJT dan Bina Marga.					BUJT	
5.	Tempat Istirahat dan Pelayanann (peningkatan yg sudah dilaksanakan)												
	- Toilet disabilitas						Badan Usaha Jalan Tol, BPJT dan Bina Marga.					BUJT	
	- Produk UMKM						Badan Usaha Jalan Tol, BPJT dan Bina Marga.					BUJT	

PROGRAM/KEGIATAN PUG BADAN PENGATUR JALAN TOL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
	- Gerakan pengurangan sampah plastik						Badan Usaha Jalan Tol, BPJT dan Bina Marga.					BUJT	
	- Bengkel (TIP A)						Badan Usaha Jalan Tol, BPJT dan Bina Marga.					BUJT	
	- Klinik (TIP A)						Badan Usaha Jalan Tol, BPJT dan Bina Marga.					BUJT	
6.	Pengadaan tenaga kerja lokal dan disabilitas						Badan Usaha Jalan Tol, BPJT dan Bina Marga.					BUJT	Sudah dilaksanakan oleh BUJT Soreang-Pasir Koja (pegawai kantor disabilitas)
7.	Pelaksanaan CSR oleh BUJT untuk infrastruktur gender						Badan Usaha Jalan Tol, BPJT dan Bina Marga					BUJT	
PENGAWASAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI													
8.	Tempat Istirahat dan Pelayanan setara gender (toilet penyandang cacat, toilet anak-anak, nursery room, parkir khusus wanita dan penyandang cacat, integrasi dengan daerah						Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol						

PROGRAM/KEGIATAN PUG BADAN PENGATUR JALAN TOL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
	sekitar, dan lansekap pemandangan)												
9.	Pengadaan tenaga kerja lokal dan disabilitas						Direktorat Jalan Bebas Hambatan. Ditjen Bina Marga. Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol.						
10.	Pelaksanaan CSR oleh BUJT untuk infrastruktur gender						Direktorat Jalan Bebas Hambatan. Ditjen Bina Marga. Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol.						

Direktorat Jenderal Cipta Karya

PROGRAM/KEGIATAN PUG DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
PENGATURAN													
1.	Penyusunan dan Legalisasi Panduan Monitoring dan Evaluasi PUG Bidang Cipta Karya						Dit. SSPIP						
2.	Finalisasi Renstra Cipta Karya 2020 -2024						Dit. PKP, Dit SSPIP						
3.	Pemutakhiran Data Terpilah DJCK						Bag. Kepegawaian dan Ortala. Sesditjen CK. PAMSIMAS. SANIMAS. KOTAKU. PISEW						
4.	Pembentukan Focal Point PUG Dilingkungan Ditjen. Cipta Karya						Pokja PUG Bidang Cipta Karya.						
5.	Review Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Padat Karya						Dit. SSPIP.						SE Dirjen Cipta Karya No. 2 tahun 2018
PEMBINAAN													

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
6.	Penyusunan PPRG dilingkungan Ditjen. Cipta Karya						Dit. SSPIP, Dit. PKP, Dit. Sanitasi, Dit. Air Minum Dit. BPB Dit. Prasarana Strategis						
7.	TOT untuk Peningkatan Kapasitas Fasilitator Masyarakat (PAMSIMAS)						Dit. Air Minum						
8.	TOT untuk Peningkatan Kapasitas Fasilitator Masyarakat (KOTAKU)						Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman						
PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN													
9.	Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di 5 Destinasi Wisata: Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Likupang,						Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman						
10.	Program Padat Karya Kegiatan (SPAM) Perdesaan / PAMSIMAS						Dit. Air Minum						Sudah ada SK Penetapan Lokasi Desa / Kelurahan Sasaran SPAM

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
													Pedesaan Padat Karya TA. 2019
11.	Program Padat Karya Kegiatan Sanitasi Perdesaan						Dit. Sanitasi						
12.	Program Padat Karya Kegiatan TPS3R						Dit. Sanitasi						
13.	Program Padat Karya Kegiatan KOTAKU						Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman						
14.	Program Padat Karya Kegiatan PISEW						Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman						
15.	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu						Dit. Bina Penataan Bangunan						
16.	Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)						Dit. Air Minum						
17.	Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)						Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
18.	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)						Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman						
PENGAWASAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI													
19.	Pelaksanaan Monev PUG dan PPRG						Dit. SSPIP						
20.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pamsimas Tingkat Nasional						Dit. Air Minum, Dit. Sanitasi						
21.	Konsolidasi Progres Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas, Padat Karya dan Stunting						Dit. Air Minum, Dit. Sanitasi Dit. PKP						
22.	Evaluasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan						Dit. SSPIP						

Direktorat Jenderal Perumahan

PROGRAM/KEGIATAN PUG DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
PENGATURAN													
1	Penyusunan Panduan Monev PPRG Ditjen Perumahan						Seluruh Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Perumahan						
2	Review dan penyusunan produk hukum terkait Penerapan PUG di lingkungan Ditjen Perumahan						Seluruh Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Perumahan						
3	Review Renstra Ditjen Perumahan 2020-2024						Direktorat SSPP						
4	Penyusunan Renstra Ditjen Perumahan 2025-2029						Direktorat SSPP						
5	Penyusunan Road Map Pelaksanaan PUG Perumahan 2025-2029						Direktorat SSPP						
6	Review dan penyusunan produk hukum terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang						Direktorat SSPP						Mendukung Ketangguhan bencana

PROGRAM/KEGIATAN PUG DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
	Perumahan (Bencana dan Relokasi)												
PEMBINAAN													
7	Penyusunan Best Practice PUG Ditjen Perumahan						Direktorat SSPP						
8	Penguatan kapasitas Focal Point pada masing-masing Direktorat, Satker/SNVT dan anggota POKJA di lingkungan Ditjen Perumahan						Direktorat SSPP						
9	Updating Data Terpilah PUG Ditjen Perumahan (Pelaku dan Penerima Manfaat)						Seluruh Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Perumahan						
10	Sosialisasi Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pelaksanaan PUG Perumahan kepada SNVT Perumahan dalam rangka Sinkronisasi dan						Direktorat SSPP						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
	Koordinasi Program Pusat-Daerah												
11	Sosialisasi kepada Pemda, Tenaga Fasilitator (TFL) Rumah Swadaya, dan pengembang terkait Penyediaan Rumah Layak Huni yang Responsif Gender						Setditjen, Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat RUK						
12	Bimbingan Teknis Penyusunan PPRG secara Mandiri kepada masing-masing Direktorat dan Satker/SNVT						Direktorat SSPP						
13	Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan (Bencana dan Relokasi)						Direktorat Perencanaan, Satker, SNVT, Balai						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
14	Penyusunan GAP dan GBS pada masing-masing Direktorat dan SNVT di lingkungan Ditjen Perumahan						Setditjen, Direktorat SSPP, Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Rumah Susun, Direktorat Rumah Khusus, Direktorat RUK, Satker dan SNVT						
15	Pengembangan dan pengelolaan berita dokumentasi kegiatan PUG pada Website Ditjen Perumahan						Setditjen						
16	Penyusunan Database terkait Updating Data Terpilah SDM di lingkungan Ditjen Perumahan (Pelaku dan Penerima Manfaat)						Setditjen						
PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN													
17	Pembinaan pra konstruksi kepada MK/supervisi, kontraktor terkait spesifikasi teknis bangunan rumah dan						Satker/SNVT/Balai,						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
	PSU yang responsif gender												
18	Kegiatan Padat Karya Tunai						Direktorat Rumah Swadaya						
19	Kegiatan Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas						Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat RUK						
20	Program Satu Juta Rumah: a. Rumah Susun b. Rumah Khusus c. Rumah Swadaya d. Bantuan PSU						Direktorat Rumah Umum dan Komersial						
21	Kegiatan Mendukung Program Strategis Nasional (Daerah Perbatasan, Nelayan, 3T, serta Korban Bencana)						Direktorat Rumah Susun, Direktorat Rumah Khusus						
22	Kegiatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)						Direktorat Rumah Swadaya						Direktif

PROGRAM/KEGIATAN PUG DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
23	Kegiatan Penanggulangan Teroris						Direktorat Rumah Susun, Direktorat Rumah Khusus						Tematik, penugasan
24	Kegiatan Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara						Direktorat Rumah Susun						
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN													
25	Pengawasan pelaksanaan kepada MK/supervisi, kontraktor terkait spesifikasi teknis bangunan rumah dan PSU yang responsif gender						Satker/SNVT/Balai						
26	Pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan yang responsif gender kepada pengembang						Direktorat RUK						
PEMANTAUAN DAN EVALUASI													
27	Kegiatan Padat Karya Tunai						Direktorat Rumah Swadaya						
28	Kegiatan Pembangunan						Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat RUK						

PROGRAM/KEGIATAN PUG DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
	Perumahan Berbasis Komunitas												
29	Program Satu Juta Rumah: a. Rumah Susun b. Rumah Khusus c. Rumah Swadaya d. Bantuan PSU						Direktorat Rumah Umum dan Komersial						
30	Kegiatan Mendukung Program Strategis Nasional (Daerah Perbatasan, Nelayan, 3T, serta Korban Bencana)						Direktorat Rumah Susun, Direktorat Rumah Khusus						
31	Kegiatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)						Direktorat Rumah Swadaya						Direktif
32	Kegiatan Penanggulangan Teroris						Direktorat Rumah Susun, Direktorat Rumah Khusus						Tematik, penugasan

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
33	Uji Petik Pelaksanaan Pembangunan Perumahan beserta PSU (termasuk Pengambilan Dokumentasi Hasil Penyediaan Perumahan yang Responsif Gender)						Seluruh Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Perumahan dan Sekret PUG						
34	Pemantauan dan Evaluasi bersama Tim PUG PUPR terkait penerapan PUG dalam Pembangunan Infrastruktur PUPR						Seluruh Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Perumahan dan Sekret PUG						
35	Evaluasi Program dan Kegiatan Perumahan yang Responsif Gender						Direktorat SSPP						
36	Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan (Bencana dan relokasi) oleh Pemda						Direktorat SSPP						Mendukung Ketangguhan bencana

**PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024**

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
37	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (KAK, GAP, GBS)						Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Rumah Susun, Direktorat Rumah Khusus, Direktorat RUK, Satker dan SNVT						
38	Penyusunan Laporan Pelaksanaan PUG dalam Lakip 2019-2020						Direktorat SSPP						

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PROGRAM/KEGIATAN PUG DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
PENGATURAN													
1.	Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi						Setditjen Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi						Tersusunnya instrumen monev yang berisi kesetaraan gender pembinaan TKK.
PEMBINAAN													
2.	Sosialisasi PUG PUPR						Setditjen						
3	Pendampingan Penyusunan PPRG						Setditjen						
PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN													
4.	Pelaksanaan SDM Vokasional Bidang Konstruksi						7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi						Jumlah pemenuhan target SDM vokasional

PROGRAM/KEGIATAN PUG DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
5.	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Terampil						7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah (Pelaksana) Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi (Monev)						Jumlah TKK terlatih sesuai supply demand; Pelaksanaan pelatihan dipantau dan dievaluasi menggunakan instrument monev.
PENGAWASAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI													
6.	Monev Pelaksanaan MoU dengan Universitas, Politeknik, dan Kementerian Hukum dan HAM						Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi						Persebaran jumlah calon peserta pelatihan dan jumlah peserta yang telah dilatih.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR

PROGRAM/KEGIATAN PUG DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PUPR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
PENGATURAN													
1.	Review Road Map PUG Ditjen Pembiayaan Perumahan 2018-2019						Seluruh Unit Eselon II di lingkungan Ditjen DJPI						
2.	Penyusunan Panduan Monev PPRG DJPI						Seluruh Unit Eselon II di lingkungan Ditjen DJPI						
3.	Review dan penyusunan Produk hukum terkait penerapan PUG di lingkungan DJPI						Setditjen						
4.	Review Renstra DJPI 2020-2024						Dit.PSSPP						
5.	Penyusunan Renstra DJPI 2025-2029						Dit PSSPP						
6.	Penyusunan Road Map Pelaksanaan PUG DJPI 2025-2029						Dit PSSPP						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
7.	Penyusunan skema pembiayaan perumahan berbasis profil MBR dan segmentasi penghasilan MBR						Dit Pelaksana Pembiayaan Perumahan						
8	Penyusunan NSPK Pelaksanaan Proyek KPBU yang responsif gender						Semua Unit Kerja						
PEMBINAAN													
9.	Penyusunan <i>Best Practice</i> PUG DJPI						Dit. PSSPP						
10.	Penguatan Kapasitas <i>Focal Point</i> pada masing-masing Direktorat dan anggota Pokja di Lingkungan DJPI						Dit.PSSPP dan Setditjen						
11.	Updating data terpilah PUG DJPI (Pelaku dan Penerima manfaat)						Dit.PSSPP dan Setditjen						
12.	Sosialisasi kepada Pemda, tenaga pendamping, perbankan dan pengembang terkait Rumah Layak Huni yang responsif gender						Dit. Pelaksana Pembiayaan Perumahan						
13.	Bimbingan Teknis penyusunan PPRG secara mandiri kepada masing-masing direktorat						Dit.PSSPP dan Setditjen						

PROGRAM/KEGIATAN PUG DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PUPR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
14.	Penyusunan GAP dan GBS pada masing-masing Direktorat di lingkungan DJPI						Dit.PSSPP dan Setditjen						
15.	Pengembangan dan pengelolaan berita dokumentasi kegiatan PUG pada website DJPI						Dit.PSSPP dan Setditjen						
16.	Penyusunan database terkait updating data terpilah SDM di lingkungan DJPI (Pelaku dan Penerima manfaat)						Dit.PSSPP dan Setditjen						
PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN													
17.	Melibatkan stakeholder dalam FGD/konsultasi publik terkait aturan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan						Dit.Pelaksana Pembiayaan Perumahan dan PPDPP						
18.	Perluasan sosialisasi Produk KPR Bersubsidi kepada kelompok rentan dan mendekatkan pada pusat kegiatan MBR						Dit.Pelaksana Pembiayaan Perumahan dan PPDPP						
19.	Pemberdayaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyaluran KPR Bersubsidi						Dit. Pelaksana Pembiayaan Perumahan dan PPDPP						

PROGRAM/KEGIATAN PUG DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PUPR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
20.	Penyaluran KPR Bersubsidi: a. FLPP b. BP2BT c. Tabungan Perumahan Rakyat						Dit.Pelaksana Pembiayaan Perumahan dan PPDPP						
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN													
21	Pendampingan MBR melalui Tenaga Pendamping untuk berkas KPR, RAB dan konsultasi desain bangunan rumah swadaya						Dit. Pelaksana Pembiayaan Perumahan						
PEMANTAUAN DAN EVALUASI													
22.	Uji petik pelaksanaan penyaluran KPR kepada MBR Informal.						Dit.PPP, PPDPP, PSSPP dan Sekret. PUG						
23.	Pemantauan dan Evaluasi bersama Tim PUG PUPR terkait penerapan PUG dalam Pembangunan Infrastruktur PUPR						Dit.PPP, PPDPP, PSSPP dan Sekret PUG						
24.	Evaluasi program dan kegiatan DJPI yang responsif gender						Dit.PSSPP dan Setditjen						
25.	Evaluasi pelaksanaan Perencanaan dan						Dit.PSSPP dan Setditjen						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
	Penganggaran yang Responsif Gender (KAK, GAP, GBS)												
26.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan PUG dalam Lakip						Dit.PSSPP dan Setditjen						

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

PROGRAM/KEGIATAN PUG BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
PENGATURAN													
1.	Melaksanakan dan legalisasi Penyusunan Rencana Strategis Kementerian yang responsif gender (berdasarkan GAP tiap Unor)						Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional						
PEMBINAAN													
2.	Sosialisasi/FGD/Pelatihan/ - Penyuluhan/Kajian/Studi : Sosialisasi Rencana Strategis Kementerian PUPR yang responsif gender - Sosialisasi Rencana Keterpaduan Pengembangan Kawasan Strategis/Perkotaan yang responsif gender.						Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional & Biro PAKLN, Setjen Sekretariat BPIW, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, dan Pusat						

PROGRAM/KEGIATAN PUG BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
							Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II						
PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN													
3.	Penyusunan Rencana Keterpaduan Pengembangan Kawasan Strategis dengan Infrastruktur Bidang PUPR yang responsif gender						Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II						
4.	Penyusunan Rencana Keterpaduan Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan Infrastruktur Bidang PUPR yang responsif gender						Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III						
5.	Penyusunan dan updating data terpilih BPIW						Sekretariat BPIW						
6.	Penyusunan GAP dan GBS						Sekretariat BPIW						
PENGAWASAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI													

PROGRAM/KEGIATAN PUG
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
7.	Monev Keterpaduan Infrastruktur PUPR dengan Kawasan Strategis/Kawasan Perkotaan						Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I						
8.	Review Renstra PUPR						Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional						

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PROGRAM/KEGIATAN PUG BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
PENGATURAN													
1.	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan SDM						Set. BPSDM						
2.	Penyusunan dan Reviu Produk Hukum BPSDM						Set. BPSDM						
3.	Penyusunan dan Reviu Renstra						Set. BPSDM dan Pusbangkom						
4.	Penyusunan dan Reviu Road Map Pelaksanaan PUG BPSDM 2020-2024						Set. BPSDM						
PEMBINAAN													
5.	Penyusunan Kalender Program Pengembangan Kompetensi SDM						Set. BPSDM dan Pusbangkom						
6.	Penyusunan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan						Pusbangkom dan Balai						
7.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kepegawaian serta Reformasi Birokrasi						Set. BPSDM						

PROGRAM/KEGIATAN PUG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
8.	Penyusunan dan Updating Data Terpilah (termasuk GAP dan GBS)						Set. BPSDM dan Pusbangkom						
PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN													
9.	Manajemen Talenta						Pusbangkom dan Balai						insert JP: Tematik Integritas, Narkoba, dan Gender
10	Pengembangan Kompetensi Bidang SDA dan Perkim						Pusbangkom dan Balai						insert JP: Tematik Integritas, Narkoba, dan Gender
11.	Pengembangan Kompetensi Bidang Jalan, Perumahan, dan PIW						Pusbangkom dan Balai						insert JP: Tematik Integritas, Narkoba, dan Gender
12.	Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen						Pusbangkom dan Balai						insert JP: Tematik Integritas, Narkoba, dan Gender

PROGRAM/KEGIATAN PUG BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020-2024													
PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		SUMBER DANA			KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024		RUTIN	STRATEGIS	APBN	APBD	LAINNYA	
13.	Pendidikan Vokasi						Pusbangkom dan Balai						insert JP: Tematik Integritas, Narkoba, dan Gender
PENGAWASAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI													
14.	Evaluasi pelaksanaan pelatihan (reguler dan strategis)						Pusbangkom dan Set. BPSDM						
15.	Evaluasi Pelaksanaan PPRG (termasuk penyajian, review, dan laporan data terpilah)						Pusbangkom dan Set. BPSDM						

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO